

PELIBATAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN KASUS GAGAL GINJAL AKUT DI INDONESIA

INVOLVEMENT OF STATE INTELLIGENCE AGENCY IN HANDLING CASES OF ACUTE KIDNEY INJURY IN INDONESIA

¹M. Yusuf Samad, ²Fatimah Azzahra

¹ASOSIASI PENELITI JARINGAN SOSIAL INDONESIA,

² FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS INDONESIA

(ahmadyusad@gmail.com, fatimah.azzahra23@ui.ac.id)

Abstrak – Kasus gagal ginjal akut di Indonesia mengalami peningkatan sejak Agustus 2022 dan pasien meninggal juga bertambah menjadi 179 orang hingga awal November 2022. Sejumlah kementerian dilibatkan termasuk insitusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak dilibatkan dalam penanganan kasus gagal ginjal akut tersebut padahal BIN memiliki rekam jejak yang baik dalam penanganan kasus kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya melibatkan BIN dalam menangani kasus gagal ginjal akut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN perlu dilibatkan dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia karena BIN memiliki kapasitas dan kapabilitas baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, hingga aturan hukum.

Kata Kunci: BIN, gagal ginjal akut, Indonesia, keamanan nasional, keamanan nontradisional

Abstract – Cases of acute kidney injury in Indonesia have increased since August 2022 the number of patients who died also increased to 179 people until early November 2022. A number of ministries were involved, including the police, to conduct investigations into alleged criminal acts. However, the State Intelligence Agency (BIN) was not involved in handling the acute kidney injury case even though BIN has a good track record in handling health cases in Indonesia. This study aims to explain the importance of involving BIN in handling cases of acute kidney injury in Indonesia. This study uses a descriptive type of qualitative approach. The results of the study show that BIN needs to be involved in handling cases of acute kidney failure in Indonesia because BIN has the capacity and capability in terms of facilities, human resources, and legal regulations.

Keywords: BIN, acute kidney injury, Indonesia, national security, nontraditional security

Pendahuluan

Keamanan nasional berkaitan dengan kesatuan wilayah dan keberlanjutan hidup bangsa dan negara dengan tanggung jawab pelaksanaannya berada pada negara yang dijalankan oleh institusi-institusi pemerintah (Manggala,

2016). Isu keamanan nasional perlu dianalisis dari perspektif keamanan nasional nontradisional untuk menghindari kesalahan manajemen dalam insiden yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan dan menggunakan pendekatan holistik untuk

keberlanjutan hidup Indonesia (Alam et al., 2021).

Praditya (2016) mengemukakan bahwa keamanan nontradisional tidak lagi digambarkan sebagai relasi antarnegara, tetapi berbicara tentang keamanan individu (Praditya, 2016). Dalam konteks aktor, pendekatan keamanan nasional nontradisional mengalami perubahan bahwa aktor keamanan tidak hanya negara saja, tetapi juga aktor bukan negara seperti individu maupun kelompok dapat menjadi aktor keamanan (Azizah, 2020).

Pelibatan sektor keamanan pada situasi krisis kesehatan merupakan dampak rasional dari sistem kesehatan nasional yang tidak siap untuk mengatasi krisis kesehatan dan penguasa yang kurang efektif mengelola pemerintahannya. Intelijen memiliki peran di tengah krisis kesehatan, yakni peran tradisional maupun nontradisional. Peran tradisional berupa deteksi dini, analisis dan inspeksi untuk antisipasi krisis kesehatan atau meminimalisir dampak dari krisis tersebut. Sedangkan, peran nontradisional berupa partisipasi secara langsung dalam penanganan krisis kesehatan, seperti terlibat dalam aktivitas *tracing*, *tracking* dan *testing*, meneliti antivirus atau obat-obatan lain, serta

memberikan perlindungan terhadap sediaan keperluan nonmedis maupun medis, dll (Nashir & Sukmawan, 2022).

Berdasarkan data diatas, kedua peran Intelijen sangat penting pada penanganan masalah di sektor kesehatan, apalagi jika masalah kesehatan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yang banyak, salah satunya adalah gagal ginjal akut. Sekitar 1,7 juta orang diperkirakan meninggal karena gagal ginjal akut setiap tahunnya (Mehta et al., 2015). Gagal ginjal akut merupakan sindrom klinis kompleks yang muncul sebagai respons terhadap banyak etiologi. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama dan bersifat global serta dapat terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun rumah sakit (KDIGO, 2012). Gagal ginjal akut adalah kondisi medis serius yang diperkirakan mempengaruhi lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya, mengakibatkan peningkatan risiko kematian di rumah sakit sebesar 1,7 hingga 6,9 kali lipat (Kellum & Murugan, 2016).

Di Indonesia, kasus gagal ginjal akut telah menimbulkan ratusan korban jiwa hingga 1 November 2022, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah korban meninggal mencapai 179 orang atau ±54%

dari 325 orang yang terpapar penyakit tersebut, ratusan korban yang terpapar tersebar di Indonesia dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta (Akbar, 2022). Adapun fasilitas kesehatan yang paling banyak merawat pasien gagal ginjal adalah RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta (Pinandhita, 2022).

Peran Badan Intelijen Negara (BIN) yang vital di sektor kesehatan dan tingginya korban terpapar penyakit gagal ginjal akut serta banyaknya korban yang meninggal, membuat keterlibatan BIN menjadi urgen dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara belum memberikan perintah kepada BIN untuk terlibat dalam penanganan kasus gagal ginjal, padahal sebelumnya presiden pernah melibatkan BIN secara langsung dalam penanganan masalah di sektor kesehatan, yakni COVID-19 (Rizqo, 2020).

Penelitian ini mengacu pada teori dan konsep *public health intelligence* dan pertahanan nirmiliter. *Public health intelligence* berfungsi sebagai informasi kesehatan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi dan aktivitas intelijen yang diawali dengan penghimpunan, sintesis, penilaian, telaah, tafsiran, yang memerlukan dukungan, monitor, dan

evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat guna mendukung pengambilan keputusan (Rajchman, 1932). *Public health intelligence* merupakan inti dari proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat hal ini beroperasi di sepanjang rangkaian data-informasi-aksi intelijen, mulai dari pengumpulan data melalui manajemen dan analisis hingga interpretasi, komunikasi dan tindakan. *Public health intelligence* bertindak sebagai penghubung antara analisis data dan tindakan dalam hal penyediaan fakta untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan, dan implementasi kebijakan (Regmi et al., 2016).

Penelitian terkait *public health intelligence* pernah dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran penolakan vaksin COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data yang ada pada media sosial dapat dimanfaatkan dalam *public health intelligence* karena perhitungan secara statistik dan dengan memanfaatkan tools media sosial mampu menambah data di bidang kesehatan masyarakat (Setyaningsih, 2022). Selain itu, Prihantoro & Swastanto (2021)

menjabarkan bahwa informasi intelijen diperlukan dalam pertahanan nirmiliter, konsep pertahanan nirmiliter ditujukan untuk menangani ancaman nonmiliter dengan memposisikan kementerian /lembaga sebagai unsur utama. Pada hakikatnya, pertahanan adalah segala cara yang bersifat universal untuk mengupayakan kepentingan nasional dalam beragam dimensi kehidupan bangsa dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui jaminan bahwa segala kegiatan masyarakat terbebas dari ancaman nonmiliter (Prihantoro & Swastanto, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya melibatkan BIN dalam menangani kasus gagal ginjal akut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat dikatakan sebagai metode *artistic* karena proses penelitian lebih bersifat kurang terpola. Selain itu, metode ini juga dapat didefinisikan sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan hasil pemahaman yang berdasarkan pada filsafat data yang ditemukan di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019).

Penelitian deskriptif digunakan pada penelitian ini, yakni penelitian yang memiliki tujuan menghimpun data dan menjabarkan secara mendalam dan cermat berlandaskan pada permasalahan yang akan diatasi (Bungin, 2012). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif tentang pentingnya melibatkan BIN dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Gagal Ginjal Akut di Sejumlah Negara

Penelitian yang melibatkan warga Haiti di bawah usia 18 tahun dengan gejala gangguan ginjal tidak bisa produksi urine dan penurunan produksi urine selama 24 jam atau lebih, menunjukkan ada 109 kasus gagal ginjal akut diantara anak-anak tersebut. Sindrom atau gejala klinis meliputi gagal ginjal, hepatitis, pankreatitis, kerusakan sistem saraf pusat, koma, hingga kematian dengan tingkat kematian yang tinggi. Pabrik sirup *Asetaminofen* lokal diketahui memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Bahan baku berupa *Gliserin* yang diimpor ke Haiti dan digunakan dalam formulasi *Asetaminofen* terkontaminasi *Dietilenglikol* (DEG).

Penelitian ini menunjukkan keterlibatan paparan agen etiologis dalam kasus gagal ginjal akut (O'Brien et al., 1998).

Kasus serupa pernah terjadi di Panama. Menurut laporan penelitian Laura Conklin dkk, sebanyak 32 orang yang menderita keracunan DEG pada tahun 2006. DEG ini dapat menjadi racun bagi ginjal dan saraf yang ditandai dengan cedera ginjal akut, gangguan neurologis, dan kematian. Penelitian tersebut mengungkapkan kasus keracunan DEG sudah ditemukan sejak lebih dari 50 tahun lalu (Conklin et al., 2014).

Tahun 2008, *Nigerian Federal Ministry of Health (FMOH)* atau Kementerian Kesehatan Nigeria menerima laporan 13 kasus gagal ginjal akut misterius pada dari rumah sakit di Kota Lagos. Beberapa pasien diketahui terpapar cairan berbasis *Asetaminofen* pada obat tumbuh gigi (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2009).

Kasus lain terjadi di Gambia dengan kasus kematian anak akibat gangguan gagal ginjal akut. Kematian anak-anak tersebut berhubungan dengan empat sirup obat batuk yang dibuat India. Merespons masalah tersebut, Presiden Gambia Adama Barrow menanggukahkan izin impor perusahaan pembuatan obat batuk India. Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) menemukan zat berbahaya dalam empat jenis sirup buatan Maiden Pharmaceuticals di India. Dari hasil tes, WHO mengungkapkan temuan kandungan DEG dan *etilen glikol* (EG) yang dilarang di empat obat tersebut (CNN Indonesia, 2022).

Respons Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia

Kasus gagal ginjal akut mulai masuk di Indonesia sejak Januari 2022 dengan jumlah dua kasus dan hingga Juli kasus tertinggi sebanyak 5 kasus. Namun, total kasus naik sebanyak 36 kasus pada Agustus 2022. Penyakit gagal ginjal akut naik drastis kembali sebanyak 78 kasus pada September (Widi, 2022).

Setelah memperoleh informasi dari WHO tentang obat sirup untuk anak yang tercemar EG dan DEG di Gambia, yakni *Magrip N Cold Syrup*, *Promethazine Oral Solution*, *Makoff Baby Cough Syrup*, dan *Kofexmalin Baby Cough Syrup*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelusuran dan memastikan daftar empat obat tersebut tidak tercatat berada di Indonesia (BPOM, 2022b).

BPOM kemudian melakukan pengujian secara bertahap terhadap obat sirup yang diduga tercemar DEG dan EG dan hasilnya adalah terdapat 198 obat

yang aman digunakan dengan ketentuan sesuai aturan pakai. Selain itu, BPOM juga melakukan upaya penindakan terhadap produsen produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM yang telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan terhadap 2 industri farmasi (BPOM, 2022a). Sementara itu, Bareskrim Polri mengambil langkah hukum dengan menaikkan status penyelidikan kasus gagal ginjal akut ke tahap penyidikan. Berdasarkan penyelidikan, PT Afi Farma memproduksi obat sirup dengan kadar EG melebihi ambang batas yang ditentukan, obat tersebut telah menjalani hasil uji laboratorium BPOM (Ismail, 2022).

Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Kesehatan merilis 156 jenis obat sirup yang aman digunakan dengan ketentuan sesuai aturan pakai (Kementerian Kesehatan, 2022). Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan distribusi sebanyak 146 vial obat penawar *Fomepizole* ke 17 rumah sakit (RS) yang menangani pasien gagal ginjal akut. Obat-obat tersebut telah didistribusikan ke 3 RS di DKI Jakarta, 3 RS di Jawa Barat, 2 RS di Bali, dan 1 RS di masing-masing provinsi, yaitu Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Aceh, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan lain-lain (Salsabilla, 2022).

Dalam perspektif keamanan nasional, kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia merupakan ancaman yang bersifat multidimensional karena banyak aspek yang dilibatkan sehingga upaya mengatasi kasus secara sektoral dan melibatkan banyak aktor. Jadi tidak hanya BPOM dan Kementerian Kesehatan saja yang bertanggung jawab dalam mengatasi ancaman ini, tetapi juga Polri, Pemerintah Daerah, dan termasuk BIN sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan nasional.

Jika merujuk pada pertahanan nirmiliter, keterlibatan BPOM sebagai unsur utama dan keterlibatan Kementerian Kesehatan dan Polri sebagai unsur lainnya dalam mengupayakan kepentingan nasional dalam bentuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman nonmiliter berupa penyakit gagal ginjal akut. Keterlibatan BPOM, Kemenkes, dan Polri disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal. Hanya saja, pelibatan intelijen belum dilakukan dalam penanganan kasus gagal ginjal di Indonesia. Padahal, informasi intelijen

diperlukan dalam mewujudkan pertahanan nirmiliter.

Penerapan pertahanan nirmiliter dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2006 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter diimplementasikan melalui tiga tahapan strategi yaitu tahap penangkalan, tahap penindakan, dan tahap pemulihan. Pertama, tahap penangkalan pada kasus gagal ginjal akut dapat dilihat dari sudut pandang penangkalan terhadap bertambahnya jumlah kasus gagal ginjal akut hingga jumlah korban jiwa akibat penyakit tersebut. Hal itu dibuktikan dengan upaya BPOM melakukan pengujian kandungan kimia yang berada pada obat yang diduga tercemar oleh EG dan DEG. Kedua, tahap penindakan dilakukan oleh BPOM dan Polri terhadap industri farmasi. Bahkan hal tersebut ditindaklanjuti Polri melalui meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Ketiga, tahap pemulihan melalui mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara distribusi obat ke belasan rumah sakit yang menangani kasus gagal ginjal di sejumlah daerah.

Solusi Alternatif Pelibatan BIN dalam Penanganan Kasus Gagal Ginjal

Pergeseran konsepsi keamanan dari fokus pada negara menjadi fokus pada manusia membuat BIN sebagai aktor keamanan nasional harus ikut serta dalam melindungi pemenuhan hak-hak dasar masing-masing warga negara (Bahtiar et al., 2021).

Partisipasi unsur intelijen negara yang dihadapkan dengan ancaman sektor kesehatan telah diterangkan di dalam Undang-Undang (UU) Intelijen Negara tentang hakikat ancaman yang menyatakan bahwa ancaman sektor kesehatan adalah salah satu ancaman terhadap keamanan manusia yang memiliki efek terhadap keamanan nasional. Pedrason (2022) menjelaskan bahwa kontribusi BIN di sektor kesehatan sudah dilaksanakan sebelum adanya UU Intelijen Negara yang ditandai dengan keberadaan Direktorat Nuklir Biologi Kimia (NUBIKA) Deputi-V BIN pada tahun 2006. Unit tersebut telah melaksanakan aktivitas intelijen seperti operasi intelijen antisipasi flu burung, antraks, bahkan limbah rumah sakit. Selain itu, BIN juga memiliki Pusat Intelijen Medis yang bertugas mengenali dan menganalisis masing-masing ancaman penyakit, pengembangan pemanfaatan metode dan teknologi mutakhir intelijen medis, dan pelaksanaan pelayanan intelijen

medis berdasarkan aturan yang berlaku (Pedrason, 2022).

Keterlibatan BIN dalam penanganan masalah di sektor kesehatan terlihat pada hasil kerja dalam menangani kasus COVID-19, yakni penyelidikan berupa analisis proses vaksinasi dan pola penyebaran, pengamanan berupa pemantauan kepulangan Warga Negara Asing, penggalangan berupa pelacakan, dan penanggulangan berupa sosialisasi warga, percepatan tes COVID-19, mobilisasi relawan, penguatan kapasitas kesehatan, hingga kolaborasi riset (Mengko et al., 2021). Bahkan, hasil kerja dari BIN khususnya percepatan vaksinasi memiliki rekam jejak yang baik karena telah mendapat apresiasi dari Joko Widodo sebagai Presiden RI (Humas Sekretariat Kabinet, 2021).

Pelibatan BIN dalam menghadapi permasalahan di sektor kesehatan perlu dilakukan mengingat BIN memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berlatar belakang pendidikan tentang kesehatan beserta unit pengembangannya, fasilitas teknologi intelijen medis, dan Pusat Intelijen Medis. Peningkatan kemampuan SDM BIN pada sektor kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) khususnya

pada Program Studi Magister Terapan Intelijen Medik (STIN, n.d.).

Dari segi fasilitas, BIN memiliki sarana dan prasarana dengan teknologi modern, yaitu *Medical Intelligence* Wangsa Avatar. Fasilitas tersebut dikelola oleh SDM yang kompeten dan memiliki peralatan yang modern, seperti laboratorium nuklir, bio molekuler, dan *virtual chemical*. Peralatan lain yaitu *Bio Safety Level 3 (BSL 3)*. Di sini, para periset dapat mengkultur penyakit riskan seperti virus *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, *lassa fever*, *rift valley fever*, demam berdarah, dan nipah. Kategori ini memberikan peluang bagi para periset untuk menghimpun dengan aman berbagai kultur virus dan sel, serta materi genetik penyakit infeksius. BIN juga memiliki peralatan berupa BSL 2 yang mampu memblokir dan mengenali patogen, serta meriset obat atau senyawa untuk mengobati penyakit tersebut. Kedua BSL tersebut sudah sesuai dengan standar *biosafety* dan *biosecurity* tingkat internasional yang ditandai dengan perolehan sertifikat *World Biohaztec* (Wakik, 2022).

Dalam perspektif *public health intelligence*, informasi kesehatan dapat dihimpun oleh BIN melalui Pusat Medikal Intelijen dan STIN. Pengumpulan

informasi tersebut dilakukan dengan mekanisme kegiatan dan operasi intelijen yang menerapkan fungsi intelijen, yakni penyelidikan. Pengumpulan informasi tentang kasus gagal ginjal akut dan penyebarannya di Indonesia dapat dilakukan dengan memberdayakan unit intelijen di daerah yang disebut dengan BIN di Daerah (BINDA). Selain itu, BIN juga dapat mengumpulkan informasi dengan cara mengoptimalkan kewenangannya sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara melalui wadah Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Melalui forum koordinasi tersebut, tercipta sinergi antarinstansi pemerintah untuk mencegah ancaman keamanan nasional (Samad & Persadha, 2022). Dalam konteks ini, BIN dapat menggelar rapat koordinasi dengan instansi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang dinilai memiliki informasi yang berkaitan dengan kasus gagal ginjal akut, misalnya BPOM, Kementerian Kesehatan, Polri, hingga pemerintah daerah seperti DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kasus gagal ginjal tertinggi di Indonesia.

Selanjutnya, hasil informasi yang dihimpun kemudian dianalisis SDM BIN yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dengan bantuan peralatan medis yang berteknologi tinggi. Senyawa atau obat yang diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut dapat diteliti dan pada akhirnya diharapkan BIN mampu membuat obat untuk mengatasi persoalan penyakit gagal ginjal akut, baik melalui riset mandiri maupun kolaborasi riset dengan kementerian/lembaga, swasta, atau perguruan tinggi. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi mendatangkan obat gagal ginjal akut dari negara lain karena Indonesia sudah mampu memproduksi dalam negeri. Secara keseluruhan, aktivitas intelijen mulai dari pengumpulan informasi hingga hasil analisis disampaikan kepada pengambil kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

Berdasarkan konsep pertahanan nirmilliter, keterlibatan BIN dapat membantu sejumlah kementerian atau lembaga yang lebih dulu terlibat dalam penanganan kasus gagal ginjal di Indonesia. Kontribusi BIN sangat membantu karena didukung oleh SDM yang mumpuni, sarana dan prasarana

medis yang canggih, dan aturan hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsi BIN dalam penanganan masalah di sektor kesehatan, termasuk kasus gagal ginjal akut. Selain itu, partisipasi BIN semakin memperkuat konsep pertahanan nirmiliter karena pada dasarnya konsep tersebut melibatkan unsur kekuatan nonmiliter dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Dalam konteks ini, pelibatan BIN sebagai bagian dari kementerian/lembaga dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

Merujuk pada Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2006, BIN dapat berkontribusi pada tahap penangkalan, penindakan hingga pemulihan. Kontribusi pada tahap penangkalan dapat berupa analisis penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut dan analisis penyebaran kasus tersebut di daerah-daerah melalui BINDA. Hasil analisis tersebut kemudian dianalisis lebih dalam hingga menganalisis risiko yang ditimbulkan dari kasus tersebut, dan pada akhirnya membuat pemetaan wilayah yang rentan terhadap kasus tersebut. Hal demikian dilaporkan secara rutin kepada klien tunggal atau pembuat kebijakan sehingga diharapkan kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah mampu menangkak bertambahnya kasus gagal ginjal akut di sejumlah daerah. Tahap selanjutnya yaitu tahap penindakan dapat berupa peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani kasus gagal ginjal akut melalui wadah Kominpus dan Kominda. Koordinasi ini diharapkan dapat merumuskan suatu kesepakatan atau strategi yang mampu menangani kasus gagal ginjal akut dan dampak yang ditimbulkan. Tahap terakhir yaitu pemulihan, pada tahap ini BIN dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga riset untuk bersinergi dalam mengembangkan obat gagal ginjal akut kemudian mendistribusikan obat tersebut ke daerah-daerah dengan pengawasan oleh BINDA.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Pelibatan BIN dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia perlu dilakukan karena pada dasarnya BIN sebagai aktor keamanan nasional memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menangani permasalahan kasus pada sektor kesehatan, termasuk kasus gagal ginjal di Indonesia yang telah mengakibatkan

ratusan korban meninggal dunia. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan diperkuat dengan Perpres 67 Tahun 2013. Selain payung hukum, BIN juga didukung oleh kapasitas dan kapabilitas SDM mumpuni dan peralatan medis yang modern sehingga BIN dapat memberikan kontribusi terhadap penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, BIN dapat berkontribusi pada setiap tahap mulai dari tahap penangkalan, tahap penindakan, hingga tahap pemulihan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti selanjutnya dapat mengelaborasi tulisan ini dengan meneliti tentang pelibatan BINDA dalam penanganan kasus gagal ginjal akut di sejumlah wilayah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akbar, N. A. (2022). Menkes: Korban Meninggal Gagal Ginjal Akut 178 Orang. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/rkpgs4328/menkes-korban-meninggal-gagal-ginjal-akut-178-orang>
- Alam, M. M., Fawzi, A. M., Islam, M. M., & Said, J. (2021). Impacts of COVID-19 pandemic on national security issues. *Security Journal*, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.105>

7/s41284-021-00314-1

- Azizah, Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3), 94–104.
- Bahtiar, A., Purwadianto, A., & Juwono, V. (2021). Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11475>
- BPOM. (2022a). Penjelasan BPOM RI Tentang Informasi Keenam Hasil Pengawasan BPOM Terkait Sirup Obat Yang Tidak Menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol. <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/162/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Informasi-Keenam-Hasil-Pengawasan-BPOM-Terkait-Sirup-Obat-Yang-Tidak-Menggunakan-Propilen-Glikol--Polietilen-Glikol--Sorbitol--dan-atau-Gliserin-Gliserol.html>
- BPOM. (2022b). Penjelasan BPOM RI Tentang Sirup Obat Untuk Anak Di Gambia, Afrika Yang Terkontaminasi Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol. In *pom.go.id*. <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/155/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Sirup-Obat-Untuk-Anak-Di-Gambia--Afrika-Yang-Terkontaminasi-Dietilen-Glikol-Dan-Etilen-Glikol.html>
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: wacana dan teoritis Penafsiran Teks*. Raja Grafindo Persada.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2009). Fatal poisoning

- among young children from diethylene glycol-contaminated acetaminophen -- Nigeria, 2008--2009. *MMWR: Morbidity and Mortality Weekly Report*, 58(48), 1345–1347.
- CNN Indonesia. (2022). Nestapa Gambia usai 70 Anak Meninggal Akibat Gagal Ginjal Akut. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221020114035-127-863098/nestapa-gambia-usai-70-anak-meninggal-akibat-gagal-ginjal-akut>
- Conklin, L., Sejvar, J. J., Kieszak, S., Sabogal, R., Sanchez, C., Flanders, D., Tulloch, F., Victoria, G., Rodriguez, G., Sosa, N., McGeehin, M. A., & Schier, J. G. (2014). Long-term renal and neurologic outcomes among survivors of diethylene glycol poisoning. *JAMA Internal Medicine*, 174(6), 912–917. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.344>
- Humas Sekretariat Kabinet. (2021). *Presiden Jokowi Tinjau Program Vaksinasi dari Pintu ke Pintu di Kota Cirebon*. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-program-vaksinasi-dari-pintu-ke-pintu-di-kota-cirebon/>
- Ismail, H. C. (2022). Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Bareskrim Naikkan Kasus PT Afi Farma ke Penyidikan. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1651876/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-bareskrim-naikkan-kasus-pt-afi-farma-ke-penyidikan>
- KDIGO. (2012). Clinical practice guideline for acute kidney injury. *Of. J. Int. Soc. Nephrol*, 2(1), 124–138.
- Kellum, J. A., & Murugan, R. (2016). Effects of non-severe acute kidney injury on clinical outcomes in critically ill patients. *Critical Care*, 20(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s13054-016-1295-4>
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirup pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)/(Atypical Progressive Acute Kidney Injury)*. *Kemkes.Go.Id*. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pengumuman/2022/Petunjuk-Penggunaan-Obat-Sediaan-Cair-atau-Sirup-pada-Anak-Dalam-Rangka-Pencegah.pdf>
- Manggala, P. U. (2016). Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 26, 68–80. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_26_Juni_2016.pdf
- Mehta, R. L., Cerda, J., Burdmann, E. A., Tonelli, M., Garcia-Garcia, G., Jha, V., Susantitaphong, P., Rocco, M., Vanholder, R., Sever, M. S., Cruz, D., Jaber, B., Lameire, N. H., Lombardi, R., Lewington, A., Feehally, J., Finkelstein, F., Levin, N., Panu, N., ... Remuzzi, G. (2015). International Society of Nephrology's oby25 initiative for acute kidney injury (zero preventable deaths by 2025): a human rights case for nephrology. *The Lancet*, 385(9987), 2616–2643. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60126-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60126-X)
- Mengko, D. M., Haripin, M., Kristimanta, P. A., & Yanuarti, S. (2021). Problematika Peran Badan Intelijen Negara Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, 16(1), 95–111.

- Nashir, A. K., & Sukmawan, D. I. (2022). Tinjauan Historis Mengenai Pelibatan Sektor Keamanan Dalam Krisis Kesehatan. *Jurnal Keamanan Nasional*, VIII(7), 1–15.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- O'Brien, K. L., Selanikio, J. D., Hecdivert, C., Placide, M. F., Louis, M., Barr, D. B., Barr, J. R., Hospedales, C. J., Lewis, M. J., Schwartz, B., Philen, R. M., St. Victor, S., Espindola, J., Needham, L. L., & Denerville, K. (1998). The epidemic of pediatric deaths from acute renal failure caused by diethylene glycol poisoning. *Jama*, 279(15), 1175–1180. <https://doi.org/10.1001/jama.279.15.1175>
- Pedraso, R. (2022). Optimalisasi Peran Medical Intelligence dalam Menghadapi Ancaman Bidang Kesehatan Studi Kasus Covid 19 di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4).
- Pinandhita, V. (2022). RI Laporkan 304 Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, 159 Meninggal. *Detik*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6381710/ri-laporkan-304-kasus-gagal-ginjal-akut-anak-159-meninggal>
- Praditya, Y. (2016). *Keamanan di Indonesia: Sebuah Kajian Strategis*. Nadi Pustaka.
- Prihantoro, M., & Swastanto, Y. (2021). Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah RI Ditinjau dari Strategi Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 11(1), 31–47.
- Rajchman, L. (1932). Public health intelligence. *The Lancet*, 219(5673). [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)74500-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)74500-4)
- Regmi, K., Bendel, N., & Gee, I. (2016). Public Health Intelligence: Issues of Measure and Method. In *Public Health Intelligence: Issues of Measure and Method*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28326-5>
- Rizqo, K. A. (2020). Menyimak Lagi Pernyataan Jokowi soal BIN Terlibat Sejak Awal Pandemi. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5191364/menyimak-lagi-pernyataan-jokowi-soal-bin-terlibat-sejak-awal-pandemi>
- Salsabilla, R. (2022). Kemenkes Salurkan 146 Fomepizole ke Pasien Gagal Ginjal Akut. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221101174402-33-384280/kemenkes-salurkan-146-fomepizole-ke-pasien-gagal-ginjal-akut>
- Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2022). Pendekatan Intelijen Strategis sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat. *Kajian*, 27(1).
- Setyaningsih, A. (2022). Penginderaan Sosial Menangkap Penolakan Vaksin Covid-19 Dalam Pendekatan Public Health Intelligence. *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, 3(1).
- STIN. (n.d.). *Program Studi*. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. <https://stin.ac.id/akademik/>
- Wakik, A. K. (2022). Resmikan Dua Fasilitas Canggih, BIN Kini Punya Medical Intelijen hingga Smart Campus di STIN. *Rmol.Id*. <https://politik.rmol.id/read/2022/05/3>

1/535368/resmikan-dua-fasilitas-
canggih-bin-kini-punya-medical-
intelijen-hingga-smart-campus-di-
stin

Widi, S. (2022). Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Melonjak dalam Tiga Bulan Terakhir. *DataIndonesia.Id*.
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-gagal-ginjal-akut-anak-melonjak-dalam-tiga-bulan-terakhir>